



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.430, 2017

BKPM. Jabatan. Kelas Jabatan. Tunjangan
Kinerja. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/18/M.SM.04.00/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang

- Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 745), sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TUNJANGAN KINERJA JABATAN STRUKTURAL

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kepala BKPM			32,805,000
2.	Wakil Kepala BKPM	I.a		29,805,000
3.	Sekretaris Utama	I.a	17	26,324,000
4.	Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran	II.a	15	14,721,000
5.	Kepala Bagian Penyusunan Program	III.a	12	7,271,000
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	IV.a	9	3,781,000
7.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran	IV.a	9	3,781,000
8.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	III.a	12	7,271,000
9.	Kepala Sub Bagian Evaluasi	IV.a	9	3,781,000
10.	Kepala Sub Bagian Pelaporan	IV.a	9	3,781,000
11.	Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan TU Pimpinan	II.a	15	14,721,000
12.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan	III.a	12	7,271,000
13.	Kepala Sub Bagian Peraturan Penanaman Modal	IV.a	9	3,781,000
14.	Kepala Sub Bagian Peraturan Lainnya	IV.a	9	3,781,000
15.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Peraturan	IV.a	9	3,781,000
16.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	III.a	12	7,271,000
17.	Kepala Sub Bagian Hubungan Kelembagaan	IV.a	9	3,781,000

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
18.	Kepala Sub Bagian Peliputan dan Hubungan Media Masa	IV.a	9	3,781,000
19.	Kepala Bagian Protokol dan TU Pimpinan	III.a	12	7,271,000
20.	Kepala Sub Bagian Protokol	IV.a	9	3,781,000
21.	Kepala Sub Bagian TU Pimpinan	IV.a	9	3,781,000
22.	Kepala Biro Umum	II.a	15	14,721,000
23.	Kepala Bagian Tata Usaha	III.a	12	7,271,000
24.	Kepala Sub Bagian Persuratan dan Dokumen	IV.a	9	3,781,000
25.	Kepala Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan	IV.a	9	3,781,000
26.	Kepala Bagian Kepegawaian	III.a	12	7,271,000
27.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai	IV.a	9	3,781,000
28.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian	IV.a	9	3,781,000
29.	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	IV.a	9	3,781,000
30.	Kepala Bagian Keuangan	III.a	12	7,271,000
31.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	IV.a	9	3,781,000
32.	Kepala Sub Bagian Gaji	IV.a	9	3,781,000
33.	Kepala Sub Bagian Verifikasi	IV.a	9	3,781,000
34.	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	III.a	12	7,271,000
35.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	IV.a	9	3,781,000
36.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	IV.a	9	3,781,000
37.	Kepala Sub Bagian Keamanan	IV.a	9	3,781,000
38.	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	I.a	17	26,324,000
39.	Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	II.a	15	14,721,000
40.	Kepala Sub Direktorat Agribisnis	III.a	12	7,271,000
41.	Kepala Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan	IV.a	9	3,781,000
42.	Kepala Seksi Kelautan, Perikanan dan Peternakan	IV.a	9	3,781,000
43.	Kepala Sub Direktorat Energi	III.a	12	7,271,000
44.	Kepala Seksi Energi Terbarukan	IV.a	9	3,781,000
45.	Kepala Seksi Energi Tak Terbarukan	IV.a	9	3,781,000

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
46.	Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Mineral	III.a	12	7,271,000
47.	Kepala Seksi Mineral Logam	IV.a	9	3,781,000
48.	Kepala Seksi Mineral Non Logam	IV.a	9	3,781,000
49.	Direktur Perencanaan Industri Manufaktur	II.a	15	14,721,000
50.	Kepala Sub Direktorat Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka	III.a	12	7,271,000
51.	Kepala Seksi Industri Logam dan Mesin	IV.a	9	3,781,000
52.	Kepala Seksi Industri Tekstil dan Aneka	IV.a	9	3,781,000
53.	Kepala Sub Direktorat Industri Kimia	III.a	12	7,271,000
54.	Kepala Seksi Industri Kimia Dasar	IV.a	9	3,781,000
55.	Kepala Seksi Industri Barang Kimia dan Farmasi	IV.a	9	3,781,000
56.	Kepala Sub Direktorat Industri Alat Transportasi dan Telematika	III.a	12	7,271,000
57.	Kepala Seksi Industri Alat Transportasi	IV.a	9	3,781,000
58.	Kepala Seksi Industri Telematika	IV.a	9	3,781,000
59.	Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan	II.a	15	14,721,000
60.	Kepala Sub Direktorat Jasa Perdagangan dan Pariwisata	III.a	12	7,271,000
61.	Kepala Seksi Jasa Perdagangan	IV.a	9	3,781,000
62.	Kepala Seksi Jasa Pariwisata	IV.a	9	3,781,000
63.	Kepala Sub Direktorat Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa Lainnya	III.a	12	7,271,000
64.	Kepala Seksi Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan	IV.a	9	3,781,000
65.	Kepala Seksi Jasa Lainnya	IV.a	9	3,781,000
66.	Kepala Sub Direktorat Kawasan Ekonomi	III.a	12	7,271,000
67.	Kepala Seksi Kawasan Ekonomi Khusus	IV.a	9	3,781,000
68.	Kepala Seksi Kawasan Ekonomi Lainnya	IV.a	9	3,781,000
69.	Direktur Perencanaan Infrastruktur	II.a	15	14,721,000
70.	Kepala Sub Direktorat Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan	III.a	12	7,271,000
71.	Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian	IV.a	9	3,781,000
72.	Kepala Seksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	IV.a	9	3,781,000

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
73.	Kepala Sub Direktorat Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air	III.a	12	7,271,000
74.	Kepala Seksi Infrastruktur Energi	IV.a	9	3,781,000
75.	Kepala Seksi Infrastruktur Sumber Daya Air	IV.a	9	3,781,000
76.	Kepala Sub Direktorat Infrastruktur Transportasi Laut, Udara dan Infrastruktur Lainnya	III.a	12	7,271,000
77.	Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi Laut	IV.a	9	3,781,000
78.	Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya	IV.a	9	3,781,000
79.	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	I.a	17	26,324,000
80.	Direktur Deregulasi Penanaman Modal	II.a	15	14,721,000
81.	Kepala Sub Direktorat Sektor Primer	III.a	12	7,271,000
82.	Kepala Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan	IV.a	9	3,781,000
83.	Kepala Seksi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan	IV.a	9	3,781,000
84.	Kepala Sub Direktorat Sektor Sekunder	III.a	12	7,271,000
85.	Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika	IV.a	9	3,781,000
86.	Kepala Seksi Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	IV.a	9	3,781,000
87.	Kepala Sub Direktorat Sektor Tersier	III.a	12	7,271,000
88.	Kepala Seksi Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi	IV.a	9	3,781,000
89.	Kepala Seksi Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya	IV.a	9	3,781,000
90.	Direktur Pengembangan Potensi Daerah	II.a	15	14,721,000
91.	Kepala Sub Direktorat Sektor Primer dan Tersier	III.a	12	7,271,000
92.	Kepala Seksi Sektor Primer	IV.a	9	3,781,000
93.	Kepala Seksi Sektor Tersier	IV.a	9	3,781,000
94.	Kepala Sub Direktorat Sektor Sekunder	III.a	12	7,271,000
95.	Kepala Seksi Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika	IV.a	9	3,781,000

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
96.	Kepala Seksi Sektor Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	IV.a	9	3,781,000
97.	Direktur Pemberdayaan Usaha	II.a	15	14,721,000
98.	Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penyuluhan	III.a	12	7,271,000
99.	Kepala Seksi Pembinaan	IV.a	9	3,781,000
100.	Kepala Seksi Penyuluhan	IV.a	9	3,781,000
101.	Kepala Sub Direktorat Kemitraan Usaha	III.a	12	7,271,000
102.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
103.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
104.	Kepala Sub Direktorat Pelayanan Usaha	III.a	12	7,271,000
105.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
106.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
107.	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	I.a	17	26,324,000
108.	Direktur Pengembangan Promosi	II.a	15	14,721,000
109.	Kepala Sub Direktorat Analisis Strategi Promosi	III.a	12	7,271,000
110.	Kepala Seksi Analisis Target Promosi	IV.a	9	3,781,000
111.	Kepala Seksi Analisis Daya Saing Promosi	IV.a	9	3,781,000
112.	Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Promosi Luar Negeri	III.a	12	7,271,000
113.	Kepala Seksi Wilayah Amerika dan Eropa	IV.a	9	3,781,000
114.	Kepala Seksi Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika	IV.a	9	3,781,000
115.	Direktur Promosi Sektoral	II.a	15	14,721,000
116.	Kepala Sub Direktorat Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan	III.a	12	7,271,000
117.	Kepala Seksi Industri Sumber Daya Alam	IV.a	9	3,781,000
118.	Kepala Seksi Jasa dan Kawasan	IV.a	9	3,781,000
119.	Kepala Sub Direktorat Promosi Industri Manufaktur	III.a	12	7,271,000
120.	Kepala Seksi Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronika	IV.a	9	3,781,000
121.	Kepala Seksi Industri Manufaktur Lainnya	IV.a	9	3,781,000
122.	Kepala Sub Direktorat Promosi Infrastruktur	III.a	12	7,271,000
123.	Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi,	IV.a	9	3,781,000

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
	Jalan dan Jembatan			
124.	Kepala Seksi Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air dan Infrastruktur Lainnya	IV.a	9	3,781,000
125.	Direktur Fasilitas Promosi Daerah	II.a	15	14,721,000
126.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Sumatera dan Kalimantan	III.a	12	7,271,000
127.	Kepala Seksi Wilayah Sumatera	IV.a	9	3,781,000
128.	Kepala Seksi Wilayah Kalimantan	IV.a	9	3,781,000
129.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Jawa dan Bali	III.a	12	7,271,000
130.	Kepala Seksi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat dan Banten	IV.a	9	3,781,000
131.	Kepala Seksi Wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali	IV.a	9	3,781,000
132.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	III.a	12	7,271,000
133.	Kepala Seksi Wilayah Sulawesi dan Maluku	IV.a	9	3,781,000
134.	Kepala Seksi Wilayah Nusa Tenggara dan Papua	IV.a	9	3,781,000
135.	Direktur Pameran dan Sarana Promosi	II.a	15	14,721,000
136.	Kepala Sub Direktorat Pameran	III.a	12	7,271,000
137.	Kepala Seksi Penyusunan Program dan Monitoring	IV.a	9	3,781,000
138.	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi	IV.a	9	3,781,000
139.	Kepala Sub Direktorat Media Cetak	III.a	12	7,271,000
140.	Kepala Seksi Materi Promosi	IV.a	9	3,781,000
141.	Kepala Seksi Publikasi dan Distribusi	IV.a	9	3,781,000
142.	Kepala Sub Direktorat Media Elektronik	III.a	12	7,271,000
143.	Kepala Seksi Materi Promosi	IV.a	9	3,781,000
144.	Kepala Seksi Pelayanan Informasi	IV.a	9	3,781,000
145.	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal	I.a	17	26,324,000
146.	Direktur Kerjasama Bilateral dan Multilateral	II.a	15	14,721,000
147.	Kepala Sub Direktorat Kerjasama	III.a	12	7,271,000

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
	Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa			
148.	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Amerika	IV.a	9	3,781,000
149.	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Eropa	IV.a	9	3,781,000
150.	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika	III.a	12	7,271,000
151.	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Asia	IV.a	9	3,781,000
152.	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Pasifik dan Afrika	IV.a	9	3,781,000
153.	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Multilateral	III.a	12	7,271,000
154.	Kepala Seksi Kerjasama Organisasi PBB	IV.a	9	3,781,000
155.	Kepala Seksi Kerjasama Organisasi Non PBB	IV.a	9	3,781,000
156.	Direktur Kerjasama Regional	II.a	15	14,721,000
157.	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Regional ASEAN	III.a	12	7,271,000
158.	Kepala Seksi Kerjasama ASEAN	IV.a	9	3,781,000
159.	Kepala Seksi Kerjasama ASEAN-Negara Mitra	IV.a	9	3,781,000
160.	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Sub Regional ASEAN	III.a	12	7,271,000
161.	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Barat Indonesia	IV.a	9	3,781,000
162.	Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Timur Indonesia	IV.a	9	3,781,000
163.	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Intra Kawasan	III.a	12	7,271,000
164.	Kepala Seksi Kerjasama APEC	IV.a	9	3,781,000
165.	Kepala Seksi Kerjasama ASEM dan Kawasan Lainnya	IV.a	9	3,781,000
166.	Direktur Kerjasama Dunia Usaha Internasional	II.a	15	14,721,000
167.	Kepala Sub Direktorat Asosiasi dan Lembaga Bisnis	III.a	12	7,271,000
168.	Kepala Seksi Asosiasi Bisnis	IV.a	9	3,781,000
169.	Kepala Seksi Lembaga Bisnis	IV.a	9	3,781,000
170.	Kepala Sub Direktorat Lembaga Keuangan	III.a	12	7,271,000
171.	Kepala Seksi Lembaga Perbankan	IV.a	9	3,781,000

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
172.	Kepala Seksi Lembaga Non Perbankan	IV.a	9	3,781,000
173.	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	I.a	17	26,324,000
174.	Direktur Pelayanan Aplikasi	II.a	15	14,721,000
175.	Kepala Sub Direktorat Aplikasi Sektor Primer dan Tersier	III.a	12	7,271,000
176.	Kepala Seksi Aplikasi Baru	IV.a	9	3,781,000
177.	Kepala Seksi Aplikasi Perluasan	IV.a	9	3,781,000
178.	Kepala Seksi Aplikasi Perubahan	IV.a	9	3,781,000
179.	Kepala Sub Direktorat Aplikasi Sektor Sekunder	III.a	12	7,271,000
180.	Kepala Seksi Aplikasi Baru	IV.a	9	3,781,000
181.	Kepala Seksi Aplikasi Perluasan	IV.a	9	3,781,000
182.	Kepala Seksi Aplikasi Perubahan	IV.a	9	3,781,000
183.	Direktur Pelayanan Perizinan	II.a	15	14,721,000
184.	Kepala Sub Direktorat Perizinan Sektor Primer dan Tersier	III.a	12	7,271,000
185.	Kepala Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana	IV.a	9	3,781,000
186.	Kepala Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi	IV.a	9	3,781,000
187.	Kepala Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa	IV.a	9	3,781,000
188.	Kepala Sub Direktorat Perizinan Sektor Sekunder	III.a	12	7,271,000
189.	Kepala Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam	IV.a	9	3,781,000
190.	Kepala Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia	IV.a	9	3,781,000
191.	Kepala Seksi Industri Aneka	IV.a	9	3,781,000
192.	Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	II.a	15	14,721,000
193.	Kepala Sub Direktorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier	III.a	12	7,271,000
194.	Kepala Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana	IV.a	9	3,781,000
195.	Kepala Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi	IV.a	9	3,781,000
196.	Kepala Seksi Pertambangan dan Energi,	IV.a	9	3,781,000

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
	Perdagangan dan Aneka Jasa			
197.	Kepala Sub Direktorat Fasilitas Sektor Sekunder	III.a	12	7,271,000
198.	Kepala Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam	IV.a	9	3,781,000
199.	Kepala Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia	IV.a	9	3,781,000
200.	Kepala Seksi Industri Aneka	IV.a	9	3,781,000
201.	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	I.a	17	26,324,000
202.	Direktur Wilayah I	II.a	15	14,721,000
203.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat	III.a	12	7,271,000
204.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
205.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
206.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi	III.a	12	7,271,000
207.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
208.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
209.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung	III.a	12	7,271,000
210.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
211.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
212.	Direktur Wilayah II	II.a	15	14,721,000
213.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan	III.a	12	7,271,000
214.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
215.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
216.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat	III.a	12	7,271,000
217.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
218.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
219.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan	III.a	12	7,271,000

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
	Tengah			
220.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
221.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
222.	Direktur Wilayah III	II.a	15	14,721,000
223.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Jawa Barat	III.a	12	7,271,000
224.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
225.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
226.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Banten dan Jawa Tengah	III.a	12	7,271,000
227.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
228.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
229.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Seluruh Sulawesi	III.a	12	7,271,000
230.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
231.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
232.	Direktur Wilayah IV	II.a	15	14,721,000
233.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Jawa Timur	III.a	12	7,271,000
234.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
235.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
236.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	III.a	12	7,271,000
237.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
238.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
239.	Kepala Sub Direktorat Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat	III.a	12	7,271,000
240.	Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier	IV.a	9	3,781,000
241.	Kepala Seksi Sektor Sekunder	IV.a	9	3,781,000
242.	Inspektur	II.a	15	14,721,000
243.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	IV.a	9	3,781,000
244.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	II.a	15	14,721,000
245.	Kepala Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program	III.a	12	7,271,000
246.	Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan	IV.a	9	3,781,000

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
	Diklat			
247.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program dan Kurikulum	IV.a	9	3,781,000
248.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	IV.a	9	3,781,000
249.	Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi	III.a	12	7,271,000
250.	Kepala Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional	IV.a	9	3,781,000
251.	Kepala Sub Bidang Diklat Teknis	IV.a	9	3,781,000
252.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	IV.a	9	3,781,000
253.	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi	II.a	15	14,721,000
254.	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi	III.a	12	7,271,000
255.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sub Sistem Pelayanan Perizinan	IV.a	9	3,781,000
256.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sub Sistem Pelayanan Informasi	IV.a	9	3,781,000
257.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras	IV.a	9	3,781,000
258.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	IV.a	9	3,781,000
259.	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan	III.a	12	7,271,000
260.	Kepala Sub Bidang Data Rencana	IV.a	9	3,781,000
261.	Kepala Sub Bidang Data Realisasi	IV.a	9	3,781,000
262.	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Penyajian Informasi	IV.a	9	3,781,000
263.	Kepala Pusat Bantuan Hukum	II.a	15	14,721,000
264.	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	III.a	12	7,271,000
265.	Kepala Sub Bidang Pidana dan Tata Negara	IV.a	9	3,781,000
266.	Kepala Sub Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	IV.a	9	3,781,000
267.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	IV.a	9	3,781,000
268.	Kepala Bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	III.a	12	7,271,000
269.	Kepala Sub Bidang Arbitrase	IV.a	9	3,781,000

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4	5
270.	Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa	IV.a	9	3,781,000

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4
1	Pustakawan Pertama	8	3,319,000
2	Arsiparis Pertama	8	3,319,000
3	Analisis Kepegawaian Muda	9	3,781,000
4	Perancang Peraturan Perundang-undangan	9	3,781,000
5	Perencana Muda	9	3,781,000
6	Perancang Perundangan Muda	9	3,781,000
7	Perancang Peraturan Perundangan	9	3,781,000
8	Pranata Komputer	9	3,781,000
9	Perancang Perundang-undangan	9	3,781,000
10	Penilai Kelayakan Investasi	9	3,781,000
11	Penilai Kelayakan Perizinan	9	3,781,000
12	Statistisi Muda	9	3,781,000
13	Statisi Ahli Pertama	8	3,319,000
14	Auditor Madya	11	5,183,000
15	Auditor Muda	9	3,781,000
16	Auditor Pertama	8	3,319,000
17	Auditor Penyelia	8	3,319,000
18	Widyaiswara Utama	13	8,562,000
19	Widyaiswara Madya	11	5,183,000
20	Widyaiswara Muda	9	3,781,000

21	Pranata Komputer Muda	9	3,781,000
22	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3,319,000

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4
1	Analisis Rencana Program dan Anggaran	7	2,928,000
2	Pengadministrasian Rencana Program dan Anggaran	6	2,702,000
3	Analisis Laporan Rencana Program dan Anggaran	7	2,928,000
4	Analisis Peraturan Perundang-undangan	7	2,928,000
5	Pranata Humas	7	2,928,000
6	Protokol	7	2,928,000
7	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7	2,928,000
8	Sekretaris	6	2,702,000
9	Penata Administrasi	6	2,702,000
10	Pengadministrasian Umum	5	2,493,000
11	Pengelola Surat	7	2,928,000
12	Petugas Penggandaan	5	2,493,000
13	Caraka	3	2,216,000
14	Pengadministrasian Kepegawaian	5	2,493,000
15	Analisis Perencanaan dan Mutasi Pegawai	7	2,928,000
16	Analisis Database	7	2,928,000
17	Analisis Jabatan Fungsional	7	2,928,000
18	Analisis Data Anggaran & Pembukuan	7	2,928,000
19	Analisis Penagihan dan Pengembalian	7	2,928,000
20	Bendahara Rutin	7	2,928,000
21	Bendahara Gaji dan TK	8	3,319,000

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4
22	Pengelola Gaji	7	2,928,000
23	Verifikator Keuangan	6	2,702,000
24	Analisis Aset Negara	7	2,928,000
25	Pengelola Barang Persediaan dan BMN	7	2,928,000
26	Pengemudi	3	2,216,000
27	Montir	3	2,216,000
28	Teknisi	4	2,350,000
29	Pengelola Kendaraan	7	2,928,000
30	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	7	2,928,000
31	Pengelola Laboratorium	7	2,928,000
32	Pengelola Bangunan Gedung	7	2,928,000
33	Pengelola Poliklinik	7	2,928,000
34	Analisis Penanganan Obyek Vital, Transportasi dan VVIP	7	2,928,000
35	Satpam	4	2,350,000
36	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	7	2,928,000
37	Perencana dan Pengkaji Sektor	7	2,928,000
38	Pengadministrasian Data Rencana Penanaman Modal	6	2,702,000
39	Analisis Data Kebijakan Bidang Usaha dan Sistem Insentif	7	2,928,000
40	Analisis Data dan Kebijakan Administrasi Penanaman Modal	7	2,928,000
41	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	7	2,928,000
42	Pengelola Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah	7	2,928,000
43	Pendata Pengembangan Potensi Daerah	5	2,493,000
44	Analisis Upaya Peningkatan Pemberdayaan Usaha Nasional	7	2,928,000
45	Pengevaluasi Kegiatan Kemitraan Usaha	7	2,928,000
46	Analisis Asosiasi Dunia Usaha	7	2,928,000
47	Analisis Strategi Promosi	7	2,928,000
48	Analisis Fasilitas Promosi Luar Negeri	7	2,928,000
49	Pengadministrasian Data Pengembangan Promosi	6	2,702,000
50	Analisis Promosi Sektor Industri Sumber Daya Alam	7	2,928,000
51	Analisis Promosi Sektor Jasa dan Kawasan	7	2,928,000
52	Analisis Promosi Sektor Industri Manufaktur	7	2,928,000
53	Analisis Promosi Sektor Industri Infrastruktur	7	2,928,000
54	Analisis Promosi Sektor Infrastruktur	7	2,928,000

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4
55	Pengadministrasi Data Promosi Sektoral	6	2,702,000
56	Pengadministrasi Data Promosi	6	2,702,000
57	Analisis Bahan Promosi Wilayah	7	2,928,000
58	Penyusun Program dan Monitoring	7	2,928,000
59	Penyelenggaraan Pameran	5	2,493,000
60	Penyusun Bahan Pameran	7	2,928,000
61	Pendistribusi dan Publikasi Pameran	5	2,493,000
62	Penyusun Bahan Promosi Elektronika	7	2,928,000
63	Pelayan Informasi	5	2,493,000
64	Pengadministrasi Sarana Promosi	6	2,702,000
65	Analisis Data Kerjasama Wilayah Amerika dan Eropa	7	2,928,000
66	Analisis Data Kerjasama Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika	7	2,928,000
67	Pengadministrasi Data Kerjasama Bilateral & Multilateral	6	2,702,000
68	Analisis Data Kerjasama Organisasi PBB dan Non PBB	7	2,928,000
69	Analisis Data Kerjasama Organisasi WTO	7	2,928,000
70	Analisis Data Kerjasama Regional	7	2,928,000
71	Analisis Data Kerjasama Organisasi ASEAN	7	2,928,000
72	Analisis Data Kerjasama Sub Regional	7	2,928,000
73	Analisis Data Kerjasama Dalam Negeri	7	2,928,000
74	Analisis Data Kerjasama Organisasi APEC	7	2,928,000
75	Pengadministrasi Data Kerjasama Regional	6	2,702,000
76	Analisis Data Kerjasama Organisasi ASEM	7	2,928,000
77	Pengelola Data Penyiapan Kerjasama Luar Negeri	7	2,928,000
78	Pengelola Data Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	7	2,928,000
79	Pengelola Data Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri	6	2,702,000
80	Analisis Aplikasi Perubahan	7	2,928,000
81	Analisis Aplikasi Baru	7	2,928,000
82	Analisis Aplikasi Perluasan	7	2,928,000
83	Pengadministrasi Aplikasi	6	2,702,000
84	Pengadministrasi Pelayanan Perizinan	6	2,702,000
85	Analisis Izin Usaha Tetap dan Angka Pengenal Importir Terbatas Sektoral	7	2,928,000
86	Analisis Tenaga Kerja Asing Sektoral	7	2,928,000

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	2	3	4
87	Verifikator Bahan Baku Sektor Primer dan Tersier	7	2,928,000
88	Pengadministrasi Fasilitas Penanaman Modal	6	2,702,000
89	Verifikator Bahan Baku Sektor Sekunder	7	2,928,000
90	Analisis Data Proyek PMA/PMDN	7	2,928,000
91	Analisis Data Proyek Untuk Bahan Pembinaan di Sektor Primer	7	2,928,000
92	Analisis Data Proyek Untuk Bahan Pembinaan di Sektor Tersier	7	2,928,000
93	Analisis Data Proyek Untuk Bahan Pembinaan di Sektor Sekunder	7	2,928,000
94	Analisis Laporan Hasil Audit	7	2,928,000
95	Pengadministrasi dan Pengarsip Dokumen Audit	6	2,702,000
96	Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan	7	2,928,000
97	Pengumpul Data dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan	6	2,702,000
98	Analisis Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan	7	2,928,000
99	Pranata Sarana Prasarana Diklat	7	2,928,000
100	Teknisi Aplikasi Komputer	7	2,928,000
101	Analisis Data Penanaman Modal	7	2,928,000
102	Pengelola Help Desk	7	2,928,000
103	Teknisi Jaringan	7	2,928,000
104	Pengelola Data Center	7	2,928,000
105	Analisis Pertimbangan Hukum	7	2,928,000
106	Analisis Bantuan Hukum	7	2,928,000
107	Penyusun Abstraksi Hukum	7	2,928,000
108	Pengadministrasi Hukum	6	2,702,000

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG